



DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SMELTER TERHADAP EKSISTENSI DAN PENDAPATAN TENAGA KERJA LOKAL PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Irfan Ido¹

¹Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Halu Oleo

irfan.ido@uho.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out: the existence, income, and income of the local workforce of PT. Putra Intisultra Perkasa before and after the enactment of the smelter development policy. This research was conducted in Konawe Selatan District. The study was conducted by the 27 families who were a local workforce of PT. Putra Intisultra Perkasa. The analysis used is the Paired Sample Test t-test analysis and descriptive analysis.

The results of this study indicate that: The existence of a local workforce PT. Putra Intisultra Perkasa after the enactment of the smelter development policy, requires local workers to survive and find work after losing their profession, known to the average local worker PT. The son of Intisultra after the layoffs worked as a traditional rock miner in C and continued to work in the mining sector instead of returning to work in the agricultural sector. The income generated by the respondents of the local workforce PT. Putra Intisultra Perkasa before the enactment of the smelter development policy averaged Rp. 1,851,000 / month, revenue after the enactment of the smelter development policy, which averaged 1,525,773 (Rupiah / Month). There is a significant difference between the income of the local workforce of PT. Putra Intisultra Perkasa, before and after the enactment of the smelter development policy.

Keywords: *Development; Existence; Income; Local workforce; Policy impacts*

I. LATAR BELAKANG

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Aktivitas pertambangan merupakan aktivitas pengerukan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktivitas pertambangan ini pada pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif pada aspek sosial ekonomi masyarakat desa (Breemer, 2013). Yusrianto (2001), usaha Pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui (non- renewable), mempunyai risiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lainnya pada umumnya.

Kecamatan Palangga Selatan merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki kandungan bahan galian Nikel yang cukup besar. Aktivitas pertambangan Nikel dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Lokasi pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Selatan terbanyak dan terluas



berada di Kecamatan Palangga Selatan, dengan jumlah produksi bahan galian Nikel yang dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Produksi Bahan Galian Nikel di Kecamatan Palangga Selatan Tahun 2010-2012

No.	Nama Perusahaan	Jumlah (Ton)		
		2010	2011	2012
1.	PT. Triple Eight Energy	523.107	314.018	-
2.	PT. Ifishdeco	-	-	276.462
3.	PT. Kembar Emas Sultra	-	-	219.005
4.	PT. Generasi Agung Perkasa	-	-	110.800
5.	PT. Putra Intisultra Perkasa	-	-	55.000

Sumber: Bidang Minerba, Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2012

Perusahaan-perusahaan pertambangan Nikel pada Tabel 1 di atas keseluruhan berproduksi di daerah Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Dua diantaranya berproduksi di Desa Waturapa yaitu PT. Kembar Emas Sultra dan PT. Putra Intisultra Perkasa (PIP). PT. Kembar Emas Sultra merupakan perusahaan lokal yang merupakan anak cabang dari perusahaan Aneka Bangunan Kendari, sedangkan PT. Putra Intisultra Perkasa (PIP) merupakan perusahaan yang berasal dari Kalimantan. Kedua perusahaan tersebut berdiri pada tahun yang sama yakni tahun 2011 tetapi baru mulai berproduksi pada awal tahun 2012 hingga sekarang.

Kehadiran usaha pertambangan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mereka bukan sebagai korban pasif dari pengusahaan pertambangan. Tapi masyarakat sekitar seharusnya dianggap sebagai suatu potensi yang berperan aktif, sehingga membawa peningkatan kapasitasnya untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Faktor penghambat untuk dapat menjadikan masyarakat sekitar sebagai actor atau pelaku adalah tingkat pendidikan rendah, kurang pengalaman, dan tidak terlatih, sehingga masyarakat hanya dipekerjakan sampai pada tahap kontruksi yang butuh tenaga kerja semi skilled dan unskilled yang cukup banyak. Setelah itu tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga ahli (Manan dan Saleng, 2004).

Regulasi kebijakan pertambangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang mengharuskan setiap perusahaan tambang yang beroperasi, meningkatkan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Dipertegas kembali pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 dijelaskan dalam bab VIII Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara dalam pasal 93 dan 94 dijelaskan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya. Kemudian disempurnakan lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral) No. 1 Tahun 2014.

Pemberlakuan kebijakan pertambangan tersebut yang mengakibatkan perusahaan tambang tutup sementara, yang berdampak pada pemberhentian sementara atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa definisi pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha. PHK akan berdampak buruk pada pendapatan masyarakat setempat serta tenaga kerja lokal, yang menurun atau berkurang, serta sumber-sumber mata pencarian masyarakat yang lain hilang, seiring dengan berhentinya kegiatan operasi perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini



adalah menganalisis Dampak Kebijakan Pembangunan Smelter Terhadap Eksistensi dan Pendapatan Tenaga Kerja Lokal Pertambangan Di Kabupaten Konawe Selatan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Dunn (dalam La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011:10) melukiskan proses analisis kebijakan sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan) yang berturut-turut ditransformasikan dari satu kelainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan meliputi: definisi, prediksi, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Lebih lanjut, dalam melakukan pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yakni eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan (La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011:10)

Lebih lanjut, argumen Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexts of policy implementation*). artinya bahwa, Grindle mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. (La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011:10). Menurut Jones (dalam La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011:9) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah. Proses implementasi bukan proses mekanis dimana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai skenario pembuat kebijakan. Artinya bahwa, ia merupakan proses yang rumit, diwarnai perbenturan kepentingan antaraktor yang terlibat, sehingga tujuan, target, dan strategi implementasi dapat berkembang. (La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011:9). Lebih lanjut lagi, Dye (2001:137) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah seluruh aktifitas yang didesain untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh legislatif. Aktifitas implementasi dapat mencakup pembentukan organisasi-organisasi baru ataupun penugasan tanggung jawab baru kepada organisasi-organisasi yang telah ada; pengembangan peraturan spesifik yang menafsirkan makna konkrit dari kebijakan; dan selalu mencakup pembuatan anggaran dan penempatan personil serta membelanjakan uang. Penjelasan konsep kebijakan dan impleentasi kebijakan di atas, memberikan kesimpulan bahwa antara input, proses dan output merupakan satu kesatuan sistematis dan proses kebijakan publik sehingga seluruh aktivitas dalam hal ini kegiatan eksplorasi pertambangan selalunya memiliki dampak (*impact*) terhadap lingkungannya. Pada tahapan ini penulis mengkaji tentang Dampak Kebijakan Pembangunan Smelter Terhadap Eksistensi dan Pendapatan Tenaga Kerja Lokal Pertambangan Di Kabupaten Konawe Selatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa di Desa Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan merupakan daerah dimana terdapat: 1. Perusahaan tambang yakni PT. Putra Intisultra Perkasa; 2. Terjadi perubahan mata pencarian masyarakat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Waturapa yang karyawan, buruh atau pekerja di perusahaan tambang PT. Putra Intisultra Perkasa. Sebanyak 27 orang. Dalam penelitian ini populasi sekaligus



menjadi sampel sehingga metode yang digunakan yakni teknik sensus. Menurut Sugiono (2008), teknik sensus di gunakan, bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer menggunakan teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data informasi melalui pengamatan secara langsung kepada masyarakat sekitar tambang.
2. Data Primer menggunakan tehnik wawancara, yaitu mengadakan komunikasi secara langsung dengan masyarakat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Data Primer menggunakan teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencermati buku-buku teks atau literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian dan bahan-bahan lainnya yang relevan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah (a) identitas responden: Umur, pendidikan, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga. lama bekerja (b) Eksistensi tenaga kerja lokal: pendapatan dan perbedaan pendapatan tenaga kerja lokal sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010.

Tehnik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Yakni data yang berupa angka-angka. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis berdasarkan analisis-analisis berikut :

- a) Eksistensi tenaga kerja PT. Putra Intisultra Perkasa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 dapat diketahui dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif.
- b) Pendapatan tenaga kerja lokal pada perusahaan tambang sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai pertambangan dapat diketahui dengan menggunakan rumus: $\text{Pendapatan} = \text{Penerimaan total} - \text{Biaya Total}$
- c) Perbedaan pendapatan tenaga kerja lokal perusahaan dari usaha utama sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 dapat diketahui dengan menggunakan uji-t dengan model persamaan menurut Sudjana (2005). Kriteria pengujian sebagai berikut :
 - ✓ Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) berarti perbedaan pendapatan tidak berbedanya (Non Signifikan)
 - ✓ Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) berarti perbedaan pendapatan berbeda nyata (Signifikan)

Hasil analisis perbedaan pendapatan tenaga kerja lokal dari usaha utama sebelum dan setelah regulasi kebijakan pertambangan juga diolah menggunakan Uji-t Paired Sample Test software SPSS 16.00.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Umur

Berdasarkan hasil wawancara, rata –rata umur responden adalah 24 dan 27 yang masing-masing berjumlah 4 responden atau 14,81%. Hal tersebut menggambarkan bahwa keseluruhan responden berada dalam kategori produktif Hal ini memberikan peluang untuk terjadinya peningkatan pendapatan terhadap tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa. Kategori umur produktif juga lebih berpotensi untuk bekerja, memperoleh penghasilan sendiri, lebih aktif dan berani menerima resiko. Sebaliknya responden yang berumur tua umunya tidak tertarik pada hal-hal yang baru, apalagi menyangkut perubahan teknologi. Keadaan umur responden tenaga kerja lokal di PT. Putra Intisultra Perkasa dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Umur Tenaga Kerja Lokal PT. Putra Intisultra Perkasa, Desa Waturapa, 2015.

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	0 - 14	0	0
2	15 - 64	27	100
3	≥ 65	0	0
Jumlah		27	100

Sumber : Data Primer diolah, 2015

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam penelitian ini yaitu pendidikan yang dicapai responden tenaga kerja lokal pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan seseorang terutama dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan pengelolaan usahanya (BPS, 2014).

Tingkat pendidikan formal merupakan salah satu aspek yang menentukan kemampuan dan cara berpikir responden dalam melaksanakan pekerjaannya. Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan di PT. Putra Intisultra Perkasa, Desa Waturapa, 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1.	SD	8	29,62
2.	SMP	10	37,03
3.	SMA	9	33,33
Jumlah		27	100,00

Sumber : Data Primer diolah, 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden PT. Putra Intisultra Perkasa tergolong sedang. Responden yang mengenyam pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas sebanyak 9 jiwa atau 33,33%, SMP sebanyak 10 jiwa atau 37,03% SD sebanyak 8 jiwa atau 29,62%. Sehingga dapat diketahui bahwa responden tenaga kerja lokal di PT. Putra Intisultra Perkasa menunjukkan Tingkat pendidikan formal yang pernah dilalui oleh responden pada umumnya tergolong dalam tingkat pendidikan yang sedang (Sekolah Menengah Pertama) karena kondisi tingkat pendidikan responden mayoritas berpendidikan SMP.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya orang dalam satu rumah tangga baik yang berasal dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga dimana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berada dalam satu unit pengelolaan ekonomi rumah tangga responden. Penggolongan anggota keluarga berdasarkan pada standar umum, bahwa jika terdapat 3 orang jumlah anggota keluarga (istri dan 2 orang anak) dikategorikan keluarga kecil, jumlah anggota keluarga 4-6 orang dikategorikan keluarga sedang, dan yang lebih dari 7 orang anggota keluarga dikategorikan keluarga besar. Jumlah tanggungan keluarga responden di PT. Putra Intisultra Perkasa dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di PT. Putra Intisultra Perkasa Desa Waturapa, 2015

No.	Jumlah Tanggungan Keluarga (orang)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 – 3	19	70,37
2.	4 – 5	8	29,62
	Jumlah	27	100,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden di PT. Putra Intisultra Perkasa masih tergolong dalam keluarga kecil dengan jumlah tanggungan keluarga 0-3 orang sebanyak 19 jiwa atau 70,37% dan 4-5 orang sebanyak 8 jiwa atau 29,62%. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata keluarga hanya mempunyai dua anak atau tiga anak karena dikarenakan pada umumnya responden telah sadar bahwa banyak anak akan menambah beban dalam keluarga yang disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga yang tidak menentu.

4. Pengalaman Kerja

Pengalaman merupakan lamanya responden atau tenaga kerja dalam bekerja di PT. Putra Intisultra Perkasa atau segala sesuatu yang pernah didapatkan atau dirasakan tenaga kerja selama bekerja di PT. Putra Intisultra Perkasa dalam hal ini diasumsikan bahwa semakin lama tenaga kerja tersebut bekerja maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan tenaga kerja tersebut.

Hasil penelitian mengenai pengalaman tenaga kerja dalam bekerja untuk seluruh responden tenaga kerja lokal Pada PT. Putra Intisultra Perkasa adalah selama 22 bulan (1 tahun,10 bulan) yaitu berjumlah 27 orang responden atau 100%. Awalnya responden bekerja pada sektor pertanian, setelah masuknya perusahaan tambang yakni PT. Putra Intisultra Perkasa, responden bekerja pada perusahaan tambang. Maka dapat disimpulkan responden tenaga kerja lokal awalnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan pada bidang pertambangan, sehingga perusahaan menerima dan menempatkan seluruh responden pada bidang-bidang yang tidak memerlukan keahlian, atau keterampilan pada sektor pertambangan dan lama bekerja responden tenaga kerja loka PT. Putra Intisultra Perkasa pada perusahaan tambang yakni 22 bulan (1 tahun,10 bulan).

B. Eksistensi Tenaga Kerja Lokal PT. Putra Intisultra Perkasa Setelah Pemberlakuan Kebijakan Pembangunan Smelter

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (UU Ketenagakerjaan Tahun 2003).

Eksistensi tenaga kerja lokal yakni keberadaan atau kehadiran tenaga kerja lokal dalam bertahan setelah adanya pekerjaan sebelumnya, bukan sesuatu yang sudah selesai tetapi bagaimana suatu proses terus menerus untuk bertahan, yang diukur dari keberadaan seseorang apakah berkembang maju (mengalami peningkatan) atau sebaliknya mengalami kemunduran.

Tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa dalam eksistensinya terhadap pekerjaan mereka akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengenai “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, yang mewajibkan setiap perusahaan tambang yang beroperasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral dengan cara membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Hal ini mengharuskan perusahaan tambang baik yang berinvestasi dalam jumlah kecil dan besar, tidak



beroperasi sampai adanya kesediaan perusahaan tersebut untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.

Perusahaan tambang PT. Putra Intisultra Perkasa, tidak beroperasi bukan atas keinginan perusahaan dengan kata lain, perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK (Pemutusan Tenaga Kerja) pada ke 27 tenaga kerja lokal secara sepihak disebabkan, perusahaan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah atau terpaksa merumahkan untuk sementara waktu karyawan atau buruh yang berkerja pada perusahaan PT. Putra Intisultra Perkasa sampai batas yang belum diketahui. Mengingat untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau pabrik smelter membutuhkan modal yang sangat besar, perencanaan yang sangat baik serta tenaga ahli khusus dibidangnya.

Eksistensi atau keberadaan tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010, dapat dilihat ketika karyawan atau buruh, mencari pekerjaan setelah kehilangan profesi atau pekerjaan sebelumnya untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Eksistensi tenaga kerja lokal setelah 27 Responden terkena PHK oleh perusahaan PT. Putra Intisultra Perkasa dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Eksistensi Tenaga Kerja Lokal PT.Putra Intisultra Perkasa Sebelum dan Setelah Berlakunya Kebijakan Pembangunan Smelter.

No	Pekerjaan	Responden	No	Pekerjaan	Responden
	Sebelum	(Σ) (%)		Setelah	(Σ) (%)
1.	Preparasi Sample Produksi	6 22,22	1.	Ahli Besi PT.Macika MM	1 3,70
2.	Terpal Mineto	5 18,51	2.	Buruh Lapangan PT. Macika MM	1 3,70
3.	Prepatory Lab. X-Ray	1 3,70	3.	Security PT. Macika MM	1 3,70
4.	Juru Bayar Tenaga Kerja Lokal	1 3,70	4.	Bendahara PT. Macika MM	1 3,70
5.	Batman	5 18,51	5.	Penambang Batu Gol.C	13 48,14
6.	Security	1 3,70	6.	Pengangkut Batu	3 11,11
7.	Buruh lapangan	8 29,62	7.	Pemilik Lahan Batu	1 3,70
			8.	Petani Padi Sawah	2 7,40
			9.	Pengusaha Kopra	2 7,40
			10.	Menganggur	2 7,40
Jumlah		27 100			27 100

Sumber Data Primer diolah, 2015

Tabel 5 menjelaskan eksistensi tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010, responden tenaga kerja lokal bekerja sebagai buruh atau pekerja tambang berjumlah 27 jiwa dengan pembagian kerja yakni sebagai preparasi sample produksi sebanyak 6 orang atau 22,2%, terpal mineto sebanyak 5 orang atau 18,51 %, prepatory lab. x-ray 1 orang atau 3,70%, juru bayar tenaga kerja lokal 1 orang atau 3,70%, yang bekerja sebagai batman berjumlah 5 orang atau 18,51%, security 1 orang atau 3,70% dan buruh lapangan berjumlah 8 orang atau 29,62%. Dan dapat dilihat saat



berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, 4 orang bekerja pada perusahaan PT. Macika Mineral Mining berjumlah 4 orang, yakni ahli besi sebanyak 1 orang atau 3,70%, buruh lapangan berjumlah 1 orang atau 3,70%, security sebanyak 1 orang atau 3,70% dan bendahara sebanyak 1 orang atau 3,70%. Selanjutnya penambang batu gol.c sebanyak 13 orang atau 48,14%, dan yang berkerja sebagai pengangkut batu berjumlah 3 orang atau 11,11%, pemilik lahan batu berjumlah 1 orang atau 3,70%, petani padi sawah berjumlah 2 orang atau 7,40%, dan yang berkerja sebagai pengusaha kopra berjumlah 2 orang atau 7,40% serta menganggur berjumlah 2 orang atau 7,40%.

Hasil penelitian ini menyatakan sebanyak 4 orang karyawan yang berkerja pada perusahaan PT. Macika Mineral Mining, merupakan karyawan yang direkrut setelah perusahaan PT. Putra Intisultra Perkasa melakukan PHK terhadap seluruh karyawan, dan diterima berkerja melalui seleksi umum dan atas referensi pemerintah desa setempat.

C. Pendapatan, dan Perbedaan Pendapatan Tenaga Kerja Lokal PT. Putra Intisultra Perkasa Sebelum dan Setelah Berlakunya Peraturan Permerintah No.23 Tahun 2010

1. Pendapatan

Menurut Boserup (1984), pendapatan adalah jumlah pendapatan keseluruhan/riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Sependapat dengan hal tersebut Sukirno (2002) menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan dari keseluruhan anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik sesuai dengan konsep dan definisi (1999) pengertian pendapatan keluarga adalah seluruh pendapatan dan penerimaan yang diterima oleh seluruh anggota Rumah tangga Ekonomi (ARTE).

Pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa adalah pendapatan formal. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan, pendapatan formal dari karyawan, karena karyawan hanya bekerja pada perusahaan saja sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing. Sehingga pendapatan yang diperoleh tenaga kerja lokal/buruh adalah pendapatan yang berasal dari hasil pekerjaan berupa gaji/upah. Upah merupakan motivasi dasar orang bekerja.

PT. Putra Intisultra Perkasa memberikan upah/gaji kepada para pekerja atau tenaga kerja lokal sebanyak 27 KK tenaga kerja lokal adalah 60.000 (Rp/ Hari) dengan jam kerja selama 6 jam. Maka gaji/upah yang peroleh adalah 1.800.000 (Rp/Bulan). Pasca tutupnya kegiatan produksi perusahaan tambang PT. Putra Intisultra Perkasa, pendapatan yang diperoleh tenaga kerja lokal sangatlah beragam. Pendapatan responden tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa pasca tutup sementara kegiatan operasi tambang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pendapatan Tenaga Kerja Lokal PT. Putra Intisultra Perkasa Setelah Berlakunya Kebijakan Pembangunan Smelter, di Desa Waturapa, 2015

Upah/gaji Sebelum	Frequency	Percent	Upah/gaji Setelah	Frequency	Percent
1.800.000	26	96.29	0	2	7.40
3.200.000	1	3.70	1.140.000	13	48.14
			1.290.953	1	3.70
			1.500.000	1	3.70
			1.540.916	1	3.70
			1.650.000	2	7.40



	Upah/gaji Sebelum	Frequency	Percent	Upah/gaji Setelah	Frequency	Percent
				1.744.000	1	3.70
				2.100.000	1	3.70
				2.250.000	1	3.70
				2.550.000	1	3.70
				2.700.000	1	3.70
				3.000.000	1	3.70
				4.400.000	1	3.70
Total		27	100.00		27	100.00
Rata-rata	1.851.852			1.525.773		
Min	1.800.000			1.140.000		
Max	3.200.000			4.400.000		

Sumber: Data Primer diolah, 2015

2. Perbedaan Pendapatan Tenaga Kerja Lokal PT. Putra Intisultra Perkasa Sebelum dan Setelah Berlakunya Kebijakan Pembangunan Smelter

Perbedaan pendapatan tenaga kerja lokal pada PT. Putra intisultra Perkasa sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan analisis Uji- T Paired Sample Test software (SPSS 16.0). Untuk melihat hasil output dari SPSS dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji- T Perbedaan Pendapatan Tenaga Kerja Lokal Sebelum dan Setelah Berlakunya Kebijakan Pembangunan Smelter di Desa Waturapa, 2015

Tabel Uji Beda T							
Kategori	Mean	N	Df	Hubungan	T- Hitung	t- Tabel ($\alpha=0,05$)	Sig.
Sebelum	1.851	27	26	0.332	2.025	1.70	0.053
Setelah	1.525	27					

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra sebelum berhentinya kegiatan operasi perusahaan tambang adalah 1.851.000 (Rp/Bulan) dan pendapatan rata-rata tenaga kerja lokal setelah berhentinya kegiatan operasi perusahaan tambang adalah 1.525.773 (Rp/Bulan). Ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat lebih rendah dari pada pendapatan sebelumnya. Dilihat dari selisih pendapatan 326.079 (Rp/bulan) sebelum tutupnya kegiatan operasi perusahaan tambang PT. Putra Intisultra Perkasa menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat lebih rendah setelah tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa di PHK.

Secara analisis, diperoleh hubungan antara pendapatan sebelum dan setelah tutup sementara kegiatan pertambangan yakni sebesar 0,332 yang artinya memiliki hubungan atau korelasi yang kuat. Untuk melihat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah penutupan tambang dilakukan dengan uji t, karena nilai t- hitung (2.025) > t- tabel (1,70) maka pendapatan tenaga kerja sebelum penutupan tambang dan setelah penutupan



tambang berbeda nyata dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat setelah terjadinya PHK oleh Perusahaan PT. Putra Intisultra Perkasa terhadap tenaga kerja lokal. Pendapatan responden tenaga kerja lokal semakin rendah dirasakan oleh masyarakat akibat meningkatnya harga-harga secara umum secara terus menerus (continue) yang dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, ketidaklancaran distribusi barang, pola konsumsi masyarakat serta nilai rupiah ditahun 2012 berbeda nyata dengan nilai rupiah di tahun 2015.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Eksistensi tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa setelah kebijakan pembangunan smelter, mengharuskan tenaga kerja lokal bertahan dan mencari pekerjaan setelah kehilangan profesi untuk keberlangsungan hidup selanjutnya, dimana rata-rata pekerja lokal PT. Putra Intisultra setelah terjadinya Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) bekerja sebagai penambang batu tradisional dan cenderung memilih untuk bekerja disektor pertambangan dari pada kembali bekerja pada sektor pertanian.
2. Pendapatan yang dihasilkan oleh responden tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 rata-rata 1.851.000 (Rp/Bulan) tertinggi adalah 3.200.000 (Rp/Bulan), dan terendah 1.800.000 (Rp/Bulan). Pendapatan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 atau setelah tutupnya kegiatan operasi perusahaan tambang rata-rata 1.525.773 (Rp/Bulan), Pendapatan terendah yang dimiliki oleh responden adalah 1.140.000 (Rp/Bulan), pendapatan tertinggi adalah 4.400.000 (Rp/Bulan) dan sebanyak 2 orang tidak memiliki pendapatan (menganggur).
3. Adanya perbedaan yang nyata dimana pendapatan tenaga kerja lokal PT. Putra Intisultra Perkasa, sebelum dan setelah berlakunya setelah kebijakan pembangunan smelter dinyatakan dengan nilai t -hitung (2.025) > t -tabel (1,70) pada tingkat kepercayaan 95%.

REFERENSI:

- BPS. 1999. Konsep dan Definisi ARTE. Jakarta.
- Breemer. J. 2013. "Analisis Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara". Skripsi Indotec. Kendari.
- Boserup, E. 1984. Peranan Wanita dalam Pembangunan Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Dye, Thomas R., 2001. *Top Down Policymaking*. New York: Chatham House Publishers.
- Dinas ESDM Prov. Sultra, Bidang Minerba. Tahun 2012. Produksi Bahan Galian Nikel di Kecamatan Palangga Selatan Tahun 2010-2012.
- La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. (2011). *Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010*. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Manan, B dan A. Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. UII Press. Yogyakarta
- Soekartawi. 1995. Teori Ekonomi Produksi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukirno, S. 2002. Pengantar Teori Mikroekonomi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.